**ABSTRAK**

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) bertujuan untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa yang efisien, efektif, terbuka, transparan, adil, bersaing dan akuntabel dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik, perlu didukung oleh pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan pengeluaran keuangan negara, baik yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) porsinya cukup besar. Ironi telah terjadi bahwa kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagian besar berasal dari kegiatan pengadaan barang/jasa, sehingga salah tugas pemeritah menyediakan *public goods* masih belum mencapai seperti yang diinginkan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan konsep implementasi kebijakan dari Mazmanian dan Sabatir (1983) dengan metode pendekatan kualitatif serta pemodelan berfikir sistemik menurut Maani dan Cavana (2000) serta Gharajedaghi (2011). Dengan pendekatan konsep-konsep di atas didapatkan variabel pengungkit untuk Karakteristik Masalah adalah Budaya Kerja, Isi Kebijakan pengungkit untuk Karakteristik Kebijakan serta Keterampilan Implementator pengungkit untuk Lingkungan kebijakan. Tata nilai pengadaan barang/jasa, yaitu Amanah adalah merupakan pengungkit untuk budaya kerja, Sistem Pelelangan Secara Elektonik (SPSE) adalah variabel pengungkit untuk isi kebijakan, serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) merupakan variabel pengungkit untuk keterampilan implementator.

Nilai efisiensi dari implementasi SPSE pada lokus penelitian yaitu Balai Besar Wilayah Sungai Citarum cukup tinggi yaitu sebesar 24%, sehingga lebih besar dari nilai efisiensi secara Nasional sebesar 12%. Namun demikian nilai efisiensi tidak menjamin efektivitas mengingat kualitas pekerjaan konstruksi Irigasi dipengaruhi oleh nilai kontrak, dimana untuk nilai kontrak di bawah 80% Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ditemui berbagai kendala dalam mewujudkan kualitas sesuai dengan spesifikasi teknis. Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang jelas, tegas dan ringkas akan membantu pula dalam proses implementasinya sehingga tidak menimbulkan multi tafsir yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Pengadaan barang/jasa pemerintah yang kredibel harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi nilai Amanah, melalui implementasi SPSE yang biasa dikenal dengan istilah *e-proc* dan dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan yang profesonal. Dengan demikian kata kuncinya adalah Amanah, sistem pelelangan secara elektronik dan Profesional menuju Indonesia aman, damai dan sejahtera.

***ABSTRACT***

*Government Procurement Procedure (PBJ) aims to carry out procurement of goods/ services that are efficient, effective, open, transparent, fair, competitive and accountable in order to improve public services. Improving the quality of public services through better governance, needs to be supported by an accountable financial management and the state financial expenditure, both derived from the State Budget and the local budget portions are quite large. The irony has been that cases of Corruption which are handled by the Corruption Eradication Commission (KPK) comes largely from the procurement of goods/services, so that one task of the government to provide public goods has yet to reach such a desirable community.*

*This study uses the concept of policy implementation of Sabatir Mazmanian (1983) with a qualitative approach and modeling systemic thinking by Maani and Cavana (2000) and Gharajedaghi (2011). With the approach of the concepts on the lever to obtain variable characteristic problem is Work Culture, Content policy levers to Characteristics and Skills Policy levers for Environment policy implementer. Values of procurement of goods/services, namely Amanah is a level for workplace culture, Electronic Procurement Systems (SPSE) is the variable to the contents of the policy levers, and Committing Officer (PPK) is a variable lever for skill implementer.*

*Value efficiency of the implementation of the locus of research that electonic procurement (SPSE) Citarum River Basin Bureau (BBWS Citarum) is high at 24%, so the efficiency is greater than the value of 12% nationally. However, efficiency does not guarantee effective value considering the quality of the construction work is influenced by the value of Irrigation contacts, which for the contact values ​​below 80% Price Estimate (HPS) encountered various obstacles in achieving quality in accordance with the technical specifications. Procurements of Goods / Services are clear, firm and concise will assist also in the process of implementation so as to avoid multiple interpretations that can be use by parties who are not responsible. Procurement of goods / services of a credible government must be carried out with upholding Amanah, through the implementation of SPSE commonly known as e-proc and carried out by professional stakeholders. Thus, the key word is trustful, e-Procurement, and Professionals to Indonesia is safe, peaceful and prosperous.*